



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 20, Oktober 2023

Tantangan Balai Latihan Kerja Komunitas

p.3

Potensi dan Tantangan Social Commerce di Indonesia

p.7

Kendala Pengembangan Biomassa Berbasis Kelapa Sawit

p.12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab

Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E.,
M.S.E.

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri

Tantangan Balai Latihan Kerja Komunitas

p.3

Program pembangunan balai latihan kerja komunitas (BLK-K) bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi. BLK-K diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mencetak SDM yang siap kerja di pasar kerja dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan BLK-K diantaranya BLK-K masih banyak yang bergantung pada pendanaan dari pemerintah, kemitraan yang dilakukan oleh BLK-K dengan pemerintah lokal belum optimal, serta kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga masih minim. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembinaan kepada BLK-K untuk bekerjasama dengan DUDI, pemilihan lokasi pembangunan BLK-K disesuaikan dengan potensi daerah dan mendorong percepatan kemandirian BLK-K dengan kemitraan dari berbagai pihak.

p.7

Potensi dan Tantangan Social Commerce di Indonesia

Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pengguna dan mencatatkan peringkat ketiga di Kawasan Asia Pasifik. Potensi tersebut menjadikan beberapa platform social media melakukan terobosan dan inovasi dengan menggabungkan antara e-commerce dan sosial media. Hal tersebut diperkuat dengan perubahan pola belanja masyarakat semenjak pandemi. Terobosan tersebut memiliki peluang bagi negara antara lain memudahkan akses UMKM dalam platform digital dan juga meningkatkan penerimaan negara, adapun tantangannya adalah predatory pricing dan impor ilegal. Komisi VI DPR RI dapat mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Perdagangan untuk memberikan pelatihan atau masukan secara masif demi meningkatkan daya saing produk UMKM di social commerce.

Kendala Pengembangan Biomassa Berbasis Kelapa Sawit

p.12

Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah untuk pengembangan energi berbasis biomassa terutama yang berasal dari kelapa sawit. Namun, dalam perkembangannya justru target biomassa Indonesia hingga pertengahan tahun 2023 masih di bawah target yang telah ditetapkan Pemerintah. Penyebab tidak tercapainya target karena terdapat beberapa kendala dalam pengembangannya diantaranya: ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan baku yang belum terjamin dan konsisten, persaingan dengan sumber energi fosil seperti batubara, dan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengkonversi biomassa menjadi energi yang diinginkan. Komisi VI DPR RI perlu untuk mendorong Kementerian Perdagangan agar lebih ketat dalam mengatur ekspor kelapa sawit dan turunannya serta memberikan prioritas penyaluran kelapa sawit untuk pengembangan biomassa.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id

Tantangan Balai Latihan Kerja Komunitas

Linia Siska Risandi^{*)}

Damia Liana^{**)}

Abstrak

Program pembangunan balai latihan kerja komunitas (BLK-K) bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi. BLK-K diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mencetak SDM yang siap kerja di pasar kerja dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan BLK-K diantaranya BLK-K masih banyak yang bergantung pada pendanaan dari pemerintah, kemitraan yang dilakukan oleh BLK-K dengan pemerintah lokal belum optimal, serta kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga masih minim. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembinaan kepada BLK-K untuk bekerjasama dengan DUDI, pemilihan lokasi pembangunan BLK-K disesuaikan dengan potensi daerah dan mendorong percepatan kemandirian BLK-K dengan kemitraan dari berbagai pihak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah mendorong pengembangan wirausaha sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Jumlah wirausaha di Indonesia saat ini cukup rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, seperti Singapura (8,76 persen), Thailand (4,26 persen), dan Malaysia (4,74 persen). Jumlah wirausaha di Indonesia hanya 3,47 persen dari jumlah penduduk padahal standar yang ditetapkan oleh bank dunia jumlah pengusaha harus lebih dari 4 persen jumlah penduduk (Katadata, 2023). Oleh karena itu, Indonesia untuk membantu memperkuat struktur ekonomi membutuhkan setidaknya empat juta wirausaha baru untuk membantu memperkuat struktur ekonomi.

Rendahnya jumlah pengusaha di Indonesia disebabkan masih kurangnya jumlah orang Indonesia yang memiliki keahlian untuk menjadi pengusaha. Berdasarkan laporan lembaga riset SMERU, orang Indonesia berusia 15 tahun yang memiliki keterampilan sangat tinggi hanya 0,5 per 100 orang dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang mencapai 6,5 per 100 orang, Thailand 9,4 per 100

orang, dan Korea Selatan 18,2 per 100 orang (Katadata, 2023). Keterampilan masyarakat yang masih minim membuat Indonesia sulit mencetak pengusaha baru. Kewirausahaan sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja baru guna meningkatkan penerimaan pajak negara, menyerap tenaga kerja, dan menjadi indikator daya saing Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan program pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) sejak tahun 2017. BLK-K merupakan unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan keagamaan non-Pemerintah yang meliputi Pondok Pesantren, Seminari, Pasraman/Pesantian, Darmasekka/Pabbajja Samanera, dan Shuyan dan federasi/ konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. BLK-K dibangun bertujuan mencetak wirausahawan baru dan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat agar terserap dalam lapangan kerja dan merespon peluang kerja dari industri sekitar. BLK-K diharapkan bisa membantu masyarakat yang sulit mengakses pelatihan kerja di daerah dan kesulitan memperoleh keterampilan untuk memasuki DUDI.

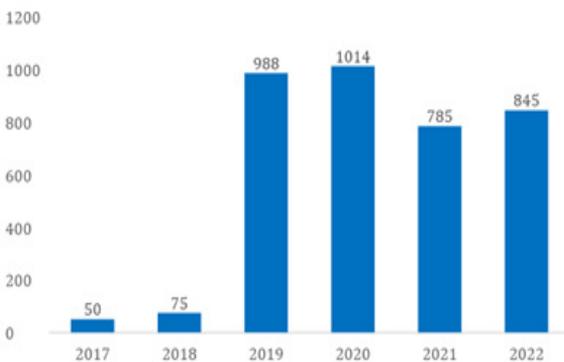
^{*)} Analis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

^{**)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Perkembangan BLK Komunitas

Pembangunan BLK-K merupakan salah satu program terobosan untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja. BLK-K telah banyak berkembang sejak tahun 2017 hingga 2022. Berdasarkan gambar 1 perkembangan BLK-K dari tahun 2017-2022 bergerak secara fluktuatif. BLK-K dibangun pada 2017 ada sebanyak 50 BLK-K, dan mengalami kenaikan 50 persen di tahun 2018 (75 BLK-K). Jumlah BLK-K mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2019 mencapai 1.217 persen (988 BLK-K). Jumlah BLK-K tahun 2022 mencapai sebesar 3.757 BLK-K yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah BLK-K yang sangat besar ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan keterampilan masyarakat di Indonesia dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Gambar 1. Perkembangan BLK Komunitas Tahun 2017-2022



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2023), diolah (2023).

BLK-K pada tahun 2017 dibangun untuk tiga kejuruan yaitu teknologi informasi dan komunikasi (TIK), teknik otomotif sepeda motor, dan las. BLK-K pada tahun 2018 dibangun untuk 4 kejuruan yaitu teknologi informasi dan komunikasi, teknik otomotif sepeda motor, dan menjahit. Pembangunan BLK-K tahun 2019 dibangun dengan 10 kejuruan, yaitu 4 kejuruan yang telah ada di tahun 2018 ditambah kejuruan pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, *refrigeration* dan teknik

listrik, industri kreatif, *Woodworking*/perkayuan dan bahasa. BLK-K pada tahun 2022 menjadi 24 kejuruan mulai dari teknik otomotif, telekomunikasi, teknik *refrigeration* pengelasan, *woodworking*, teknik perkapalan, teknik infrastruktur telekomunikasi, elektronik, informatika, robotika, multimedia, desain komunikasi visual, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, seni, seni kriya, teknik batik, desain mode dan tekstil, rias-rias, bahasa, perhotelan, kesehatan tradisional, seni kuliner, keperawatan, dan keterampilan alat kesehatan. Pembangunan BLK-K program kejuruan tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi setiap daerah yang beragam.

Pemerintah mengklasifikasikan BLK-K menjadi tiga, yaitu tumbuh, berkembang, dan mandiri. BLK-K klasifikasi tumbuh artinya BLK-K sudah bisa menyelenggarakan pelatihan dengan baik. BLK-K Klasifikasi berkembang berarti BLK-K dapat memberikan pelatihan, menjalin kemitraan untuk pendanaan pelatihan, dan pemberdayaan alumni. BLK-K klasifikasi mandiri berarti BLK-K telah sampai pada tahap mampu menghidupi lembaganya dan memproduksi barang/jasa. BLK-K yang telah dibina hingga tahun 2022 yaitu BLK-K mandiri berjumlah 283 balai (7,53 persen), BLK-K berkembang sebanyak 876 balai (23,32 persen), dan BLK-K tumbuh berjumlah 1.752 balai (46,63 persen). BLK-K yang tersebar di 263 kab/kota berpotensi memberikan peluang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Pendanaan BLK Komunitas

Pemerintah memberikan bantuan dana kepada BLK-K dalam bentuk pendirian bangunan beserta peralatan sesuai jenis pelatihan yang diusulkan. Pemerintah memberikan bantuan dana sebesar Rp1 milyar kepada setiap BLK-K. Bantuan dana BLK-K yang diberikan pemerintah terdiri dari Rp500 juta untuk pembangunan gedung, Rp300 juta untuk

sarana dan prasarana, dan Rp200 juta untuk pelatihan instruktur. Bantuan dana BLK-K diberikan selama dua tahun untuk meningkatkan kemampuan pengelola dan instruktur BLK-K pengelola serta anggaran untuk melaksanakan paket pelatihan (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021).

BLK-K memerlukan tata kelola yang baik agar mampu menyelenggarakan pelatihan kerja. Tata Kelola BLK-K membutuhkan biaya besar untuk membiayai fasilitas tenaga pengajar, peralatan praktik, kurikulum, dan sertifikasi kompetensi. BLK-K sebagian besar masih bergantung pada pendanaan dari pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021). Pengelolaan BLK-K diharapkan tidak hanya menunggu pendanaan dari pemerintah pusat. BLK-K diharapkan bisa mencari dana dari pemerintah daerah, kemitraan dengan sektor bisnis, *corporate social responsibility* (CSR) dan kedermawaan Masyarakat.

Berdasarkan data Bappenas (2022) BLK-K sebanyak 561 (62,13 persen) masih cukup sulit untuk melakukan pembiayaan mandiri. Jumlah BLK-K yang menyatakan tidak mengalami kesulitan untuk pembiayaan mandiri hanya 53 (5,87 persen). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap tata Kelola 3.757 unit BLK-K serta membantu BLK-K berkordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak kemitraan agar mampu menjadi mandiri dalam masa dua tahun.

Tantangan yang dihadapi BLK Komunitas

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh BLK-K yaitu **pertama**, BLK-K masih kesulitan untuk menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan atau lapangan kerja yang sesuai dengan bidang pelatihan yang didapatkan (Suryono *et.al.*, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prakarsa (2020) sebanyak 85 persen BLK-K sama sekali tidak memiliki kerja sama/kemitraan dengan industri/pemberi kerja dan BLK-K yang memiliki kerja sama hanya sebesar 15 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa BLK-K belum mampu bekerja sama secara strategis untuk mengembangkan kurikulum yang terintegrasi dengan industri dan pemberi kerja. Menurut penelitian Nuraeni, *et.al.* (2022) alumni BLK-K juga masih kesulitan untuk terserap dalam dunia industri. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki lulusan BLK-K dengan kebutuhan DUDI. **Kedua**, kemitraan BLK-K dengan pemerintah lokal masih belum optimal. Banyak kepala BLK-K masih kurang berkolaborasi dengan kepala desa (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021).

Berdasarkan penelitian lembaga riset Prakarsa (2020) sebanyak 77 persen BLK-K masih belum pernah memiliki kerjasama dengan pemerintah lokal dan hanya 23 persen BLK-K yang memiliki kerja sama dengan pemerintah lokal. **Ketiga**, lokasi pembangunan BLK-K masih belum dekat dengan sentra kawasan industri (Kompas, 2023). **Keempat**, BLK-K perlu mengembangkan kompetensi-kompetensinya dan membangun sisi *entrepreneur* dan pengalaman DUDI.

Berdasarkan paparan di atas, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembinaan kepada BLK-K sehingga dapat menjalin koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dengan DUDI, pemilihan lokasi pembangunan BLK-K dalam menentukan kejuruan harus disesuaikan dengan potensi daerah untuk pengembangan bisnis dan penyerapan tenaga kerja di industri, serta mendorong percepatan kemandirian BLK-K dengan kemitraan dari berbagai pihak.

Daftar Pustaka

Bappenas. (2022). Konsep Pembiayaan Mandiri BLK Di Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Katadata. (2023). Jumlah Wirausahawan di Indonesia Ganjal Pertumbuhan Ekonomi. Diakses melalui <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6464b3d3c584e/jumlah-wirausahawan-di-indonesia-ganjal>

pertumbuhan-ekonomi, pada 11 Oktober 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan. (2023). Laporan Kinerja Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan. (2021). Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) 2022-2024. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Kompas. (2023). Sebanyak 283 BLK Komunitas di Nilai Telah Mandiri. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/11/sebanyak-283-blk-komunitas-dinilai-telah-mandiri>, pada 11 Oktober 2023.

Nuraeni, Yeni, Ari Yuliasuti, Faizal Amir Nasution, Asep Saepul Muharam, Faizul Iqbal. (2022). Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Dalam Menyediakan Tenaga Kerja Pada Dunia Usaha dan Industri. *Jurnal Ketenagakerjaan* (Vol.17, No. 1).

Prakarsa. (2020). Laporan Evaluasi Balai Latihan Kerja (BLK-K) Angkatan 2017—2018, Jakarta: The Prakarsa.

Suryono, Ivan Lilin, Rita Parmawati, Rotua Yossina Warsida, Maryani Maryani, Roos Arafat Ahmad Yani. (2022). Efektivitas Balai Latihan Kerja Komunitas dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja. *Jurnal Ketenagakerjaan* (Vol.17, No. 1).

Potensi dan Tantangan Social Commerce di Indonesia

Orlando Raka Bestianta^{*)}

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar^{**)}

Abstrak

Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pengguna dan mencatatkan peringkat ketiga di Kawasan Asia Pasifik. Potensi tersebut menjadikan beberapa platform social media melakukan terobosan dan inovasi dengan menggabungkan antara e-commerce dan social media. Hal tersebut diperkuat dengan perubahan pola belanja masyarakat semenjak pandemi. Terobosan tersebut memiliki peluang bagi negara antara lain memudahkan akses UMKM dalam platform digital dan juga meningkatkan penerimaan negara, adapun tantangannya adalah predatory pricing dan impor ilegal. Komisi VI DPR RI dapat mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Perdagangan untuk memberikan pelatihan atau masukan secara masif demi meningkatkan daya saing produk UMKM di social commerce. Selain itu, jika social diperbolehkan beroperasi kembali commerce di Indonesia maka Komisi XI DPR RI dapat mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional untuk mengawasi barang impor yang akan diperdagangkan di Indonesia apakah sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Beberapa tahun yang lalu e-commerce lahir dan berkembang di Indonesia dengan sangat pesat. Perkembangan pesat tersebut juga didukung pasar Indonesia yang sangat besar. Data Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir nilai transaksi belanja daring meningkat signifikan hingga empat kali lipat. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp106 triliun, hingga akhir 2022 jumlahnya menjadi Rp476 triliun. Nilai transaksi pada periode yang sama menggunakan uang elektronik meningkat lebih besar, dari Rp106,7 triliun menjadi Rp1.177,7 triliun.

Laporan We Are Social (2023) menyebutkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia sangat besar. Tahun 2022 lalu jumlahnya 191,4 juta pengguna atau sekitar 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menempati urutan ketiga di kawasan Asia Pasifik setelah China (983,3 juta pengguna) dan India (467 juta pengguna). Selama hampir satu dekade, jumlah pengguna media sosial aktif di

Indonesia naik tiga kali lipat, dari 62 juta pengguna (2014) menjadi 191,4 juta pengguna (2022).

Potensi tersebut menjadikan platform social media melakukan inovasi dengan menggabungkan e-commerce dengan social media atau biasa dikenal dengan social commerce. Social commerce tentu menawarkan kelebihan dibandingkan e-commerce antara lain seperti pembeli dan penjual dapat berinteraksi dengan lebih leluasa, serta dapat bertransaksi langsung tanpa harus masuk ke situs atau aplikasi digital lain.

DSInnovate melalui Social Commerce (2022) melaporkan, bahwa pasar social commerce di Indonesia pada tahun 2022 mencapai US\$8,6 miliar dengan pertumbuhan 55 persen, dan diperkirakan pada tahun 2028 akan mencapai US\$86,7 miliar. Hasil survei yang dilakukan Populix menunjukkan bahwa social media yang paling banyak digunakan untuk berbelanja adalah TikTokShop, WhatsApp, Facebook Shop, dan Instagram Shop. Munculnya social commerce kemudian menuai pro kontra dari beberapa pihak. Salah satu pihak yang memprotes hadirnya social

^{*)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

^{**)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

commerce adalah para pedagang di pasar konvensional. Protes tersebut dikarenakan harga di *social commerce* dirasa terlalu murah sehingga masyarakat memilih untuk berbelanja di *social commerce*.

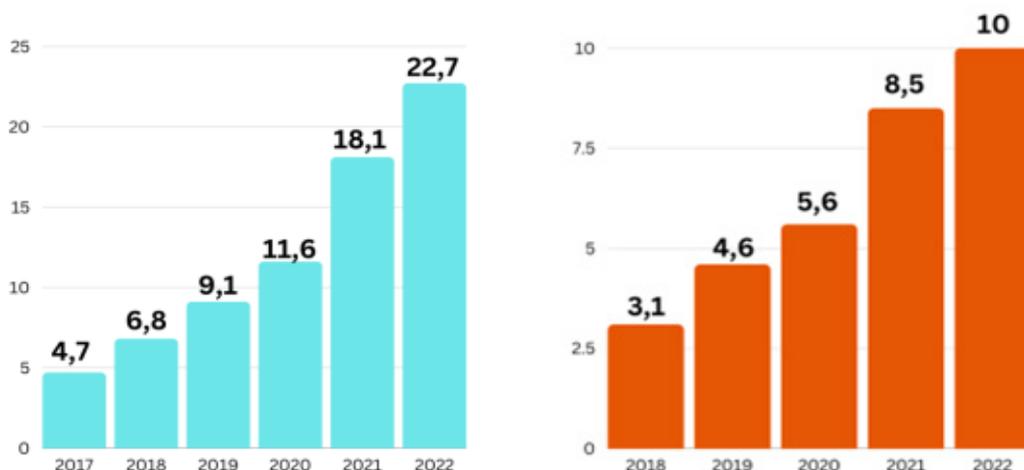
Langkah yang diambil pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yakni melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 dengan menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Sebagai salah satu *platform social commerce* yang terdampak dari peraturan tersebut, TikTok Shop resmi tidak beroperasi lagi di Indonesia sejak tanggal 4 Oktober 2023. Beberapa pihak menyayangkan penutupan TikTok Shop dikarenakan mulanya pemerintah hanya mengatur operasi TikTok Shop di Indonesia bukan menutupnya. Penutupan tersebut juga berpengaruh pada UMKM yang mengandalkan TikTok Shop untuk memasarkan produknya. Namun baru-baru ini pemerintah membuka peluang TikTok Shop untuk beroperasi kembali di Indonesia dengan catatan menaati peraturan yang telah berlaku. Hal tersebut juga direspon positif oleh TikTok Shop dengan membuat aplikasi Tiktok Shop,

tentu ini akan menimbulkan masalah baru mengingat pangkal masalahnya adalah ketidakmampuan UMKM bersaing dengan produk luar negeri, *predatory pricing* dan masuknya barang ilegal dari luar negeri. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, agar *social commerce* bermanfaat kepada UMKM dan penerimaan negara. Tulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi VI yang mempunyai ruang lingkup dan tugas di bidang Perdagangan, UKM serta Komisi XI DPR RI yang mempunyai ruang lingkup di bidang keuangan dalam mengambil kebijakan terkait dengan *social commerce* di Indonesia.

UMKM go digital

Pemerintah terus mendorong UMKM untuk dapat menjalankan bisnisnya di *platform* digital salah satunya dengan program UMKM Go Digital. Dalam Roadmap Digitalisasi Koperasi dan UMKM tertuang target UMKM *onboard* digital yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2024 adalah sebanyak 30 juta UMKM (saat ini baru 22 juta UMKM *onboarding*). Jumlah UMKM yang ada di Indonesia saat ini adalah 65,4 juta UMKM, artinya jika target jumlah UMKM *onboard* digital

Gambar 1. Nilai Transaksi Hari Belanja Nasional pada E-commerce dan Nilai Transaksi Produk Lokal (Triliun Rupiah)



Sumber: NielsenIQ Indonesia (2022), diolah (2023).

pada tahun 2024 tercapai yakni sebesar 30 juta UMKM dibandingkan dengan jumlah UMKM *existing* maka pemerintah hanya mampu mendorong kurang dari 50 persen UMKM di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital (dengan catatan tidak ada pertumbuhan angka UMKM). Hadirnya *social commerce* tentu membantu pemerintah dalam mendorong UMKM dalam menjalankan bisnisnya di *platform* digital.

Menurut NielsenIQ Indonesia (2022), nilai transaksi produk lokal pada HARBOLNAS terus mengalami peningkatan. Nilai transaksi produk lokal pada tahun 2018 sebesar Rp3,1 triliun dan mengalami peningkatan 22 persen dan pada tahun 2019 menjadi Rp4,6 triliun. Kenaikan nilai transaksi terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 56 persen dari tahun sebelumnya (Rp8,5 triliun). Nilai transaksi produk lokal pada tahun 2022 sebesar Rp10 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 18 persen. Pasal 36 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam rangka promosi dan meningkatkan Perdagangan dalam negeri, Menteri menyelenggarakan kegiatan hari belanja *online* produk nasional, artinya pemerintah saat ini lebih *aware* dengan produk UMKM sehingga mendorong produk dalam negeri untuk lebih bersaing di pasar digital. Kebijakan tersebut diprediksi akan mendorong kenaikan nilai transaksi khususnya pada produk lokal, dengan catatan apabila program pemberdayaan UMKM khususnya terkait dengan pemasaran dijalankan dengan serius.

Tantangan *Predatory Pricing*

Munculnya *social commerce* biasanya disertai dengan adanya *predatory pricing*. *Predatory pricing* merupakan strategi bisnis memberikan penawaran produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan merusak atau menghancurkan pesaing. Dalam konteks *social commerce*, *predatory pricing* bisa memiliki beberapa bentuk:

Pertama, diskon ekstrem. Penjual di *platform social commerce* dapat menawarkan produk dengan diskon,

bahkan di bawah harga modal, tujuannya untuk menarik pelanggan dari pesaing mereka. Strategi ini membuat pesaing sulit bersaing dan kemudian mengambil alih pangsa pasar.

Kedua, subsidi harga. Beberapa bisnis mungkin mampu menawarkan harga yang rendah karena mereka menerima subsidi atau dukungan keuangan eksternal. Subsidi dapat digunakan untuk menurunkan harga produk di *platform social commerce* sehingga sulit bagi pesaing yang tidak memiliki akses ke subsidi serupa.

Ketiga, penawaran gratis. *Social commerce* juga menawarkan produk secara gratis atau dengan harga sangat rendah untuk mengumpulkan data pelanggan atau membangun basis konsumen yang besar. Setelah memiliki basis pelanggan yang besar, mereka dapat mencoba untuk memonetisasi basis konsumen melalui berbagai cara, seperti iklan atau penjualan produk tambahan.

Strategi *predatory pricing* dapat mengancam keberlangsungan UMKM di dalam negeri karena merupakan bentuk persaingan tidak adil, dalam jangka panjang dapat menghilangkan pesaing kemudian memonopoli pasar. Pembuktian kasus *predatory pricing* seringkali rumit, karena sulit membedakan antara harga yang rendah sebagai strategi kompetitif yang sah dan harga yang rendah yang dimaksudkan untuk menghancurkan pesaing.

Menyikapi kondisi tersebut, UMKM perlu melakukan inovasi demi mencari peluang dalam segmen pasar yang berbeda, selain itu Komisi VI DPR RI dapat mendorong pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kemenkop UKM untuk memberikan pelatihan secara masif demi meningkatkan daya saing produk UMKM di *social commerce*. Komisi VI juga dapat mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi harga, utamanya pada *platform* digital. KPPU nantinya dapat mengambil sikap tegas pada

platform digital yang melakukan *predatory pricing*. Akses permodalan juga menjadi penting dalam rangka peningkatan daya saing produk, maka dari itu pemerintah dapat bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan guna mengedukasi UMKM mendapatkan akses modal baik secara digital ataupun manual.

Tantangan Impor Ilegal

Tantangan *predatory pricing* tentu tidak terlepas dengan impor ilegal dalam *social commerce*. Beberapa contoh impor ilegal dalam *social commerce* diantaranya, **pertama**, impor barang palsu atau tiruan. Penjualan atau pembelian produk palsu atau tiruan melalui *platform social commerce* melanggar hak cipta, merek dagang, atau undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Kedua, penghindaran pajak dan bea cukai. Pengusaha yang mencoba menghindari pembayaran pajak dan bea cukai yang seharusnya dikenakan pada barang-barang yang diimpor. Memalsukan nilai faktur, label produk dan asal barang merupakan sedikit contoh bagaimana pengusaha dapat menghindari pajak dan bea cukai dan menekan harga jual di pasaran. **Ketiga**, impor barang yang tidak sesuai standar. Beberapa produk harus memenuhi standar tertentu sebelum dapat diimpor dan dijual di pasar tertentu. Impor barang yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) dapat dikategorikan sebagai barang impor ilegal.

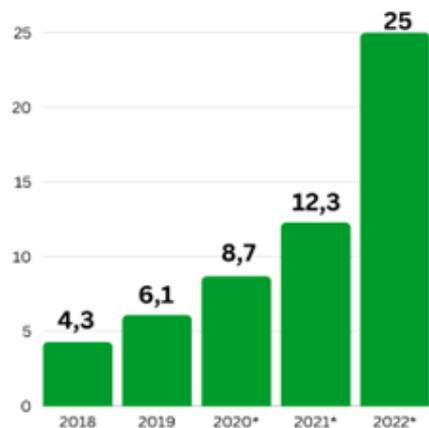
Komisi XI DPR RI dapat mendorong pemerintah agar terus melakukan koordinasi antara Direktorat Bea dan Cukai dan Badan Standarisasi Nasional untuk mengawasi barang impor ke apabila barang yang masuk ke Indonesia belum sesuai dengan standar dalam negeri maka diharuskan untuk mengurus persyaratan. Harapannya adalah impor ilegal dapat dikendalikan secara optimal.

Peningkatan pendapatan negara

Gross Merchandise Value (GMV) social commerce di Indonesia menurut laporan Sirclo dan Ravenry (2020) diprediksi terus

mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, 2021, 2022 adalah sebesar US\$8,7 juta, US\$12,3 juta, US\$25 juta. Data tersebut menunjukkan bahwa *social commerce* memiliki potensi besar di Indonesia. Pertumbuhan waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia juga memiliki tren positif salah satunya TikTok. Total waktu yang dihabiskan pada *platform* media sosial tersebut adalah 29 jam dalam jangka waktu 1 bulan, naik 25,5 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya dan merupakan durasi terpanjang dibandingkan dengan sosial media lainnya.

Gambar 2. *Gross Merchandise Value (GMV) social commerce* di Indonesia (Milliar Dollar)



*perkiraan nilai GMV

Sumber: Sirclo dan Ravenry (2020), diolah (2023).

Tentu ini merupakan potensi besar dilihat dari penerimaan negara melalui perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) atau pajak digital hingga Juli 2023 mencapai Rp13,87 triliun. Pajak digital dapat lebih dari angka tersebut ketika memang *social commerce* kembali beroperasi di Indonesia dengan melibatkan pelaku UMKM.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. (2023). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Default.aspx>, pada 5 Oktober 2023.

- DSInnovate. (2022). *Social Commerce Report: Digitizing the Second-Tier Cities in Indonesia*. Jakarta: DSInnovate.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2022). *Roadmap Digitalisasi Koperasi dan UMKM Nasional*. Diakses melalui <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=program-kukm&sub=0>, pada 5 Oktober 2023.
- Kementerian Perdagangan. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kompas. (2023). *Setelah "E-Commerce", Muncul "Social Commerce"*. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/27/setelah-e-commerce-muncul-social-commerce>, pada 5 Oktober 2023.
- NielsenIQ Indonesia. (2022). *The Findings of HARBOLNAS 2022*. Jakarta: NielsenIQ.
- Populix. (2022). *The Social Commerce Landscape in Indonesia*. Jakarta: Populix.
- Sirclo dan Ravenry. (2020). *Navigating Indonesia's E-Commerce: Covid-19 Impact & The Rise Social Commerce*. Jakarta: Sirclo.
- We Are Social dan Kepios. (2023). *Digital 2023 (Indonesia)*. Jakarta: We Are Social.

Kendala Pengembangan Biomassa Berbasis Kelapa Sawit

Nova Aulia Bella^{*)}
Leo Iskandar^{**)}

Abstrak

Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah untuk pengembangan energi berbasis biomassa terutama yang berasal dari kelapa sawit. Namun, dalam perkembangannya justru target biomassa Indonesia hingga pertengahan tahun 2023 masih di bawah target yang telah ditetapkan Pemerintah. Penyebab tidak tercapainya target karena terdapat beberapa kendala dalam pengembangannya diantaranya: ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan baku yang belum terjamin dan konsisten, persaingan dengan sumber energi fosil seperti batubara, dan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengkonversi biomassa menjadi energi yang diinginkan. Komisi VI DPR RI perlu untuk mendorong Kementerian Perdagangan agar lebih ketat dalam mengatur ekspor kelapa sawit dan turunannya serta memberikan prioritas penyaluran kelapa sawit untuk pengembangan biomassa.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi zat karbon yang bertujuan menjaga kenaikan suhu global dengan meningkatkan target *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) menjadi 32 persen atau senilai 912 juta ton CO₂ pada tahun 2030 mendatang. Pemerintah Indonesia sebelumnya menargetkan pengurangan emisi karbon 29 persen atau setara dengan 835 juta ton CO₂. Salah satu usaha untuk mencapai target tersebut adalah melalui pengembangan energi biomassa. Energi berbasis biomassa menjadi salah satu energi alternatif yang sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk mencapai target E-NDC dikarenakan biomassa memiliki beberapa kelebihan salah satunya yaitu bersifat dapat diperbaharui (*renewable*) sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan (*sustainable*).

Biomassa merupakan bahan organik yang bersifat terbarukan dan diproduksi baik secara langsung maupun tidak langsung dari makhluk hidup tanpa kontaminasi dari zat lain atau limbah. Bahan utama biomassa dapat berasal dari limbah hutan dan pabrik, tanaman pertanian dan limbah, kayu dan kayu limbah, kotoran hewan, residu operasi ternak, tanaman

air, cepat tumbuh pohon dan tanaman, sampah kota dan industri.

Pengembangan energi berbasis biomassa menjadi salah satu sumber energi terbarukan paling penting di dunia pada saat ini. Biomassa telah memenuhi 10,6 persen dari total kebutuhan energi dunia (International Energy Agency, 2006). Kapasitas biomassa di Indonesia saat ini mencapai 15 persen dari total kapasitas pembangkit. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 guna mendorong peningkatan pemanfaatan biomassa sebagai sumber tenaga listrik. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas PLT Bioenergi (*project pipeline*) melalui penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang diperbarui secara berkala, fasilitasi diskusi *debottlenecking* pengembangan PLT Bioenergi, pembaharuan potensi bioenergi secara berkala, penyusunan aplikasi monitoring investasi, penyusunan kerangka kegiatan kerja sama seperti kajian dan pendampingan teknis dengan berbagai mitra untuk pengembangan PLT Bioenergi, serta pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun

^{*)} Analis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

^{**)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

2006 tentang kebijakan Energi Nasional yang menargetkan penggunaan energi bauran (*energy mix*) pada tahun 2025 dimana energi terbarukan (*biofuel*, *geothermal*, biomas, nuklir, tenaga air, tenaga surya dan angin) yang diharapkan berkontribusi bagi pemenuhan energi nasional hingga 15 persen. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 untuk meningkatkan pengembangan *biofuel*. Pengembangan energi alternatif/energi terbarukan dipandang sebagai sebuah keniscayaan yang secepatnya perlu untuk dikembangkan dan bioenergi dipandang sebagai salah satu alternatif yang paling menjanjikan.

Potensi sumber bahan baku utama biomassa di Indonesia terbesar salah satunya berasal dari limbah kelapa sawit. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) potensi biomassa yang berasal dari limbah kelapa sawit mencapai 5.822 MW. Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) mengungkapkan bahwa sumber daya pembangkit dari energi biomassa telah mencapai 32,6 Giga Watt. Sedangkan energi biomassa yang masuk dalam RUPTL 2021-2030, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM) baru mencapai 5,5 GW.

Potensi PLTBM di Indonesia terdapat dalam hutan tanaman energi. Potensi energi tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia wilayah timur. Total luas hutan tanaman energi mencapai 10,8 juta hektare. Hasil energi biomassa dapat berasal dari tanaman kelapa sawit, karet, singkong, kayu, kotoran sapi, sekam, jagung, tebu, dan sejenisnya. Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pemanfaatan biomassa sebagai energi bersih. Untuk mewujudkan misi tersebut, pemerintah mencanangkan kawasan hutan produksi yang khusus diperuntukkan pembangunan hutan energi sebagai penghasil bahan baku bioenergi. Berdasarkan potensi dan masih jauhnya capaian biomassa sebagaimana

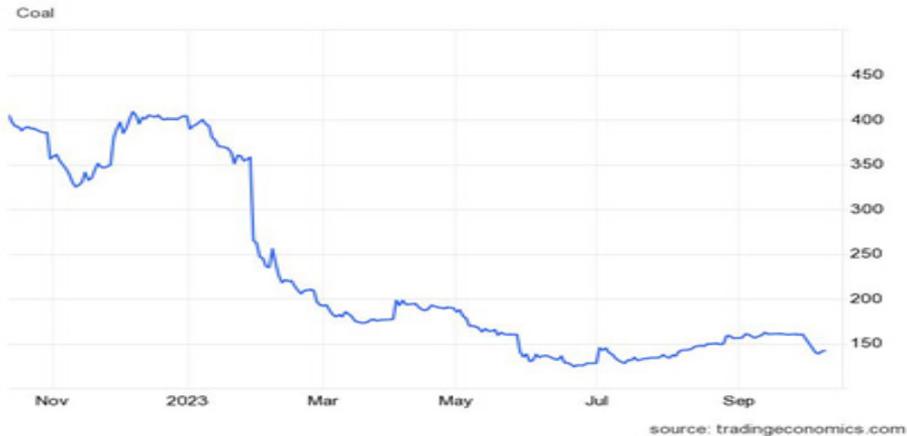
dicanangkan dalam RUPTL, maka kajian ini akan mencoba mengkaji kendala apa yang dihadapi dan alternatif solusinya.

Kendala Pengembangan Biomassa Berbasis Kelapa Sawit

Saat ini berbagai negara di dunia termasuk Indonesia tengah gencar dalam mengembangkan energi berbasis biomassa karena lebih *sustainable* dan diklaim lebih ramah lingkungan. Penggunaan biomassa tidak mengandung CO₂ sehingga tidak memperparah peningkatan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target 1 juta ton biomassa pada akhir 2023 dan 10,2 juta ton pada tahun 2023. Namun berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi per 23 Juli 2023 adalah 484 ribu ton biomassa dengan menghasilkan energi sebesar 520 gigawatt per jam (GWh) atau masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dalam perkembangan biomassa berbasis kelapa sawit sebagai salah satu sumber utama bahan baku biomassa, di antaranya adalah:

Pertama, jaminan ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan baku yang belum terjamin dan konsisten. Saat ini kelapa sawit digunakan selain sebagai bahan baku biomassa juga digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, pelumas, kosmetik, cat, dan berbagai produk lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Seperti diketahui, Indonesia saat ini merupakan eksportir kelapa sawit dan produk turunannya terbesar pertama di dunia dimana permintaan ekspor akan produk kelapa sawit dan produk turunannya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Selain itu, harga ekspor kelapa sawit terus cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuat produsen kelapa sawit lebih terinsentif untuk mengekspor kelapa sawit dan produk turunannya dibanding untuk konsumsi dalam negeri. Tingginya permintaan akan kelapa sawit dan produk turunannya tersebut mengakibatkan

Gambar 1. Perkembangan Harga Batubara



Sumber: tradingeconomics, (2023).

pasokan kelapa sawit untuk bahan baku biomassa menjadi terbatas sedangkan jika pemerintah menginginkan industri biomassa berkembang dibutuhkan konsistensi ketersediaan dan pasokan bahan baku salah satunya kelapa sawit. Dibutuhkan adanya kuota khusus untuk menjaga pasokan bahan baku biomassa hasil perkebunan kelapa sawit yang khusus diperuntukan sebagai bahan baku biomassa dan membatasi jumlah ekspor kelapa sawit.

Kedua, persaingan dengan sumber energi fosil seperti batu bara. Harga energi fosil contohnya batubara yang cenderung menurun pada tahun 2022 dan 2023 dan diprediksi akan terus turun hingga Tahun 2024 mendatang (tradingeconomics, 2023). Hal tersebut mengakibatkan harga biomassa relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan sumber energi fosil. Sebagaimana diketahui batubara dan sumber energi biomassa merupakan dua komoditas yang bersifat substitusi dimana jika satu komoditas harga menurun maka akan menurunkan permintaan akan komoditas yang lainnya.

Ketiga, biaya yang dibutuhkan untuk mengkonversi biomassa menjadi energi yang diinginkan sangat tinggi. Semakin tinggi teknologi yang dibutuhkan untuk mengkonversi biomassa menjadi energi, semakin mahal harga investasi yang dibutuhkan. Pembiayaan adalah titik kritis dimana implementasi proyek

pengembangan biomassa dapat terlaksana. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia tidak maju secepat perkiraan banyak pemangku kepentingan. Sekitar 46 persen dari proyek pembangkit listrik yang berbasis biomassa masih mencari tambahan pemenuhan pembiayaan. Bank dan lembaga keuangan sebagai salah satu penyandang dana dalam pengembangan biomassa menghadapi beberapa kendala dalam membuat keputusan investasi pada proyek biomassa di antaranya: (1) Terbatasnya proyek energi bersih yang dibiayai secara komersial dan/atau berhasil diimplementasikan; (2) Kurangnya informasi yang konsisten yang dibagi oleh para pemangku kepentingan (pengembang proyek, penyedia teknologi, pemerintah, PLN dan penyedia dana) sebagai referensi bagi pemberi pinjaman dan investor; (3) Kurangnya manajer bank senior dan pengalaman petugas dalam mengevaluasi proposal proyek pengembangan biomassa. Umumnya proposal pengembangan biomassa dievaluasi oleh Divisi Energi PLN dengan latar belakang yang kuat di bidang minyak dan gas.

Pentingnya Kerja Sama antar Lembaga dalam Pengembangan Biomassa berbasis Sawit di Indonesia

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah sebagai modal

penting dalam pengembangan biomassa di Indonesia. Kekayaan sumber daya tersebut akan sia-sia jika tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Untuk itu, Komisi VI DPR RI perlu untuk mendorong Kementerian Perdagangan agar lebih ketat dan selektif terkait ekspor kelapa sawit dan turunannya. Perlu dibuat regulasi yang jelas terkait prioritas penjualan kelapa sawit untuk mengutamakan hasil perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku biomassa dalam negeri. Hal tersebut perlu untuk menjaga pasokan kelapa sawit agar tetap stabil guna memenuhi pengembangan biomassa di Indonesia.

Terkait masalah pembiayaan, perlu adanya usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang proyek pengembangan biomassa dalam rangka meningkatkan kesediaan bank dan lembaga keuangan untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan biomassa. Selain itu, perlu adanya usaha Kementerian/Lembaga terkait serta para pemangku kepentingan terkait konsistensi data terbaru dan akurasi data terkait pengembangan biomassa di Indonesia yang dapat menjadi acuan para calon investor. Pemerintah juga dapat menawarkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan investor baik dalam dan luar negeri untuk mengembangkan biomassa di Indonesia.

Pemerintah juga perlu untuk mendorong pengembangan biomassa melalui pemberian subsidi harga kelapa sawit dan komoditas lainnya yang digunakan sebagai bahan baku biomassa untuk menekan harga kelapa sawit sehingga harga kelapa sawit menjadi relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga sumber energi fosil (contohnya batu bara). Pemerintah juga dapat melakukan kerja sama berbasis komunitas petani kelapa sawit yang dikhususkan untuk pasokan biomassa.

Daftar Pustaka

Alfiandana. (2023). Melihat Potensi Biomassa di Indonesia, Energi Terbarukan

yang Ramah Lingkungan. Diakses melalui <https://voi.id/teknologi/206434/melihat-potensi-biomassa-di-indonesia-energi-terbarukan-yang-ramah-lingkungan>, pada 5 Oktober 2023.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2020). Biomassa Sawit, Sumber Energi Terbarukan. Diakses melalui <https://www.bpdp.or.id/biomassa-sawit-sumber-energi-terbarukan>, pada 5 Oktober 2023.

International Energy Agency. (2006). *IEA Annual Report*. Paris: International Energy Agency.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Potensi Pengembangan Bioenergi di Indonesia. Diakses melalui <https://ebtke.esdm.go.id/lintas/id/investasi-ebtke/sector-bioenergi/potensi>, pada 5 Oktober 2023.

Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Pengembangan Biomassa Berkelanjutan Dukung Akselerasi EBT. Diakses melalui <https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/07/24/3539/pengembangan.biomassa.berkelanjutan.dukung.akselerasi.ebt>, pada 5 Oktober 2023.

Kompas. (2023). Terpengaruh Harga, Kinerja Emiten Batubara Ikut Turun. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/23/harga-turun-kinerja-emiten-batu-bara-ikut-turun>, pada 5 Oktober 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Energi Bersih, Buku Pedoman Untuk Lembaga Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Tia Agustian. (2021). Studi Pemanfaatan Limbah Biomassa sebagai RawMaterial Adsorben SiC dalam Penurunan Konsentrasi Amonia sebagai Parameter Bau dalam Air Limbah. *Jurnal Teknologi Lingkungan* Vol.22 No.2.

Tradingeconomics. (2023). *Coal Prices*. diakses dari <https://tradingeconomics.com/commodity/coal>, pada 6 Oktober 2023.



**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

